

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka kesimpulan dari hasil penelitian ini sebagai berikut :

1. Prosedur pemberian pinjaman di Koperasi karyawan Prima Tirta PDAM Surya Sembada Kota Surabaya dalam menjalankan sistem pemberian pinjaman tidak konsisten dengan prosedur pemberian pinjaman yang telah ditetapkan.
2. Bagian keuangan dan HRD dalam prakteknya terjadi *Miss Communication* dalam konfirmasi pencairan dana pinjamannya. Hal ini dapat menyebabkan tidak adanya kontrol untuk pencairan dana pemberian pinjaman.
3. Dalam pemberian pinjaman di koperasi karyawan Prima Tirta PDAM Surya Sembada Kota Surabaya tidak ada batasan yang jelas dalam melakukan otorisasi (Pemberian kekuasaan) untuk pemberian penambahan nilai pinjaman anggota. Hal ini menyebabkan bagian pinjaman mengalami kesulitan untuk memproses penambahan nilai pinjaman anggota.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan, diberikan saran-saran yang dapat menjadi bahan pertimbangan yang bermanfaat bagi Koperasi karyawan Prima Tirta PDAM Surya Sembada Kota Surabaya, yaitu :

1. Koperasi karyawan Prima Tirta PDAM Surya Sembada Kota Surabaya, harus lebih memperhatikan prosedur pemberian pinjaman yang terjadi dalam prakteknya. Dikatakan efektif pemanfaatan sistem informasi akuntansi pemberian pinjaman, jika prosedur pemberian pinjaman yang telah ditetapkan Kopkar telah sesuai dengan praktek dan realisasi yang terjadi di lapangan. Dengan adanya *Standart Operasional Prosedur* (SOP) dapat digunakan dalam pemberian pinjaman untuk memastikan bahwa setiap keputusan, langkah atau tindakan dan penggunaan fasilitas pemrosesan yang dilaksanakan oleh orang-orang yang ada didalam organisasi dapat berjalan secara efektif dalam pemanfaatan sistem informasi akuntansi pemberiannya, yang konsisten, standart, dan sistematis.
2. Bagian keuangan dan HRD seharusnya menjalin komunikasi yang baik untuk pencairan dan konfirmasi dana pinjaman. Bagian keuangan harus membuat Form pencairan dan konfirmasi dana pinjaman dan diserahkan kepada HRD untuk mengetahui besarnya gaji dan pinjaman yang dilakukan oleh anggota Kopkar sendiri. Konfirmasi bagian keuangan dan HRD ini dapat mengontrol kegiatan simpan pinjam yang dilakukan oleh anggota Kopkar sendiri, agar tidak terjadi salah paham antara kedua belah pihak.
3. Tidak adanya batasan yang jelas dalam penambahan pinjaman anggota di koperasi karyawan PDAM Surya Sembada kota Surabaya sehingga harus melakukan rapat koordinasi antara pengawas dan pengurus. Rapat koordinasi ini untuk membahas mengenai aturan yang berkaitan dengan

penambahan nilai pinjaman anggota serta meningkatkan kinerja bagian pinjaman untuk memproses penambahan pinjaman anggota dengan menggunakan sistem informasi akuntansi siklus pinjaman melalui penggunaan Form Penambahan Nilai Pinjaman dan syarat-syarat yang ditentukan.